

**Strategi Pengembangan Suku Dayak Meratus  
Desa Juhu Provinsi Kalimantan Selatan**  
*Developmental Strategy of Suku Dayak Meratus  
Juhu Village South Borneo Province*

**Mohamad Sukeri Khalid dan Nurul Azkar**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lambung Mangkurat, Jl Brijen Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin.  
Telpon (0511) 330 4595. <e-mail: [al\\_azkari@yahoo.com](mailto:al_azkari@yahoo.com)> HP 0811 510363.  
Diterima 28 April 2014, direvisi 5 Mei 2014, disetujui 21 Juli 2014.

**Abstract**

*Marginalization process on Suku Dayak Meratus, South Borneo Province, during a new order has slightly change then in reformation era government, though an experiment of being marginalized in a long period of time loomed traumatic feeling, so they have been precarious and tending persistent against government policy, included the policy of reformation government. But behind all of the conditions, Suku Dayak Meratus Juhu Village living in tropical forest of Meratus Hill have defense strategy and selves development to enhance their welfare, and still keep traditional value related to their environment natural prevention.*

**Keywords:**

***Marginalization-Suku Dayak Meratus-Developmental Strategy***

**Abstrak**

Proses marjinalisasi Suku Dayak Meratus di Desa Juhu pada masa pemerintahan Orde Baru telah mengalami sedikit perubahan di masa pemerintahan reformasi. Walaupun demikian, pengalaman dimarjinalkan dalam waktu yang lama menimbulkan rasa trauma, sehingga mereka sangat hati-hati dan cenderung resisten terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pemerintahan reformasi. Tetapi di balik semua itu, Suku Dayak Meratus Desa Juhu yang bermukim di hutan tropis Pegunungan Meratus ini memiliki strategi bertahan dan mengembangkan diri guna meningkatkan kesejahteraannya, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional berkenaan dengan kelestarian alam sekitarnya.

**Kata Kunci:**

**Marjinalisasi-Suku Dayak Meratus-Strategi Pengembangan**

**A. Pendahuluan**

Sejak rezim Orde Baru mengambil alih kepemimpinan nasional tahun 1967 dan berhasil mengkonsolidasi kekuasaan selama dua tahun, mulai tahun 1969 pemerintah Indonesia pada dasarnya menjadikan teori modernisasi sebagai azas pembuatan kebijakan publik. Menurut Supriyatno (2009), pada saat awal tersebut pemerintah memperkenalkan kebijakan baru yang dinamakan pembangunan nasional, suatu program yang sangat menarik hati rakyat karena berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup, dan demokrasi dengan menekankan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, guna menyokong pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Orde Baru mengubah sistem ekonomi terpimpin kepada ekonomi berorientasi mekanisme pasar (Kunarjo *dalam* Prisma, 1996).

Kebijakan pemerintah pusat yang didominasi militer bekerjasama dengan teknokrat membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan secara berkala 5 tahun menjadi Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) merupakan cetak biru (*blue print*) yang dirumuskan secara *top down* dan harus diikuti semua pemerintah daerah dari tingkat gubernur, bupati/walikota, camat, sampai kepala desa/lurah. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan mendatangkan devisa guna mendorong pertumbuhan ekonomi adalah lahirnya UU No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan sebagai payung hukum Hak Pengusahaan Hutan.

Kebijakan yang memprioritaskan pembangunan ekonomi tersebut menimbulkan efek

negatif berupa melebarnya kesenjangan ekonomi dan pelayanan sosial antara perkotaan dan pedesaan, terutama desa-desa yang jauh dari kota. Hasil kajian Mubyarto *et al* (1991) di Desa Sebuku, Long Temuyat, Long Lebusan, Long Midang, Long Umung, dan Long Layu menemukan bahwa kebijakan pembangunan pedesaan 'belum banyak' manfaatnya bagi masyarakat pedalaman di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kondisi yang relatif sama sebenarnya juga terjadi pada desa-desa di pedalaman pegunungan Meratus Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami marginalisasi akibat kebijakan pengelolaan hutan yang dikeluarkan pemerintah pusat (Tsing, 1998). Dalam hal ini, hutan dieksploitasi atas nama kepentingan pembangunan dengan azas UU No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang menegaskan "tidak dibenarkan andaikata hak ulayat suatu masyarakat hukum adat setempat digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan rencana umum pemerintah, misalnya menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk kepentingan proyek-proyek besar". Pengabaian atas hak-hak adat ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH yang menyatakan "demi keselamatan umum di areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka perusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan, dibekukan".

Kesenjangan, kemiskinan, dan marginalisasi sebagai dampak kebijakan yang bersifat top down berpadu dengan krisis multi dimensional yang terjadi tahun 1996-1997, mendorong kalangan intelektual (dimotori mahasiswa) melakukan demonstrasi yang berhasil mengakhiri kekuasaan rezim Orde Baru. Sejak awal pemerintahan reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Gus Dur terjadi arus balik kekuasaan dari sistem pemerintahan sentralistik ke sistem desentralistik yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Penerapan sistem desentralisasi memberi harapan bagi masyarakat di daerah dengan asumsi, kalau pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat maka pelayanan yang

diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, akomodatif, inovatif, dan produktif (Rasyid, 2009). Tetapi kenyataannya, pola pikir dan tindakan sebagian besar penyelenggara pemerintahan di daerah masih berorientasi pada: mementingkan kepentingan sendiri; kerjasama tidak efektif; tanpa visi dan misi yang jelas; percaya diri rendah; dan tingkat korupsi yang tinggi (Supriyatno, 2009). Akibatnya, pembangunan di daerah, khususnya pembangunan pedesaan selama masa reformasi belum menampakkan hasil yang menggembirakan.

Keterbelakangan pedesaan antara lain dibuktikan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan trend penurunan angka kemiskinan di perkotaan dari tahun 2009 (4,82 persen), tahun 2010 (4,54 persen), tahun 2011 (3,84 persen), dan tahun 2012 (3,56 persen). Sebaliknya di pedesaan terjadi fluktuasi angka kemiskinan dari 5,33 persen tahun 2009, meningkat 5,69 persen tahun 2010, meningkat 6,34 persen tahun 2011, dan kemudian menurun menjadi 6,07 persen tahun 2012. Dalam kaitan ini, disumsikan bahwa diantara desa-desa miskin yang paling menderita adalah desa-desa di pedalaman pegunungan Meratus yang warganya masih hidup subsisten dengan komoditas utama padi sebagai hasil berladang (Mustari *dalam* Banjarmasin Post, 8 Agustus 2012). Sisi lain tindakan diskriminasi terlihat dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak mencantumkan kepercayaan Kaharingan dengan alasan tidak diakui pemerintah pusat sebagai agama, sebagaimana diberitakan Banjarmasin Post (2 Oktober 2012), termasuk bagi warga Desa Dayak Meratus Juhu yang sebagian besar masih hidup berkelana (Azkar, *et al*, 2013).

Fenomena kehidupan Suku Dayak Meratus Desa Juhu yang sebagian besar masih hidup berkelana tersebut menjadi bukti bahwa perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik dimasa pemerintahan orde baru ke sistem desentralistik di era reformasi masih tetap menempatkan Suku Dayak Meratus Juhu dalam posisi marginal. Masalah ini menarik untuk diteliti karena Suku Dayak Meratus Juhu yang bermukim di pedalaman pegunungan Meratus ini tetap eksis, walaupun telah lama mengalami marginali-

sasi. Dalam konteks inilah penelitian difokuskan pada strategi Suku Dayak Meratus Desa Juhu dalam mempertahankan dan mengembangkan diri sendiri. Hasil penelitian yang berangkat dari penggalan potensi keswadayaan masyarakat ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sekaligus dapat menjadi basis pengambilan kebijakan guna pengembangan Suku Dayak Meratus yang merupakan bagian integral bangsa Indonesia.

## B. Kajian Teori

Uraian di atas menegaskan bahwa marjinalisasi Suku Dayak Meratus Juhu merupakan akibat dari kebijakan pemerintah yang berazaskan modernisasi. Pendekatan modernisasi sendiri berawal dari hasil kajian ahli-ahli ilmu sosial Amerika Serikat yang menemukan bahwa kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang disebabkan, masyarakat di negara-negara berkembang belum memiliki mentalitas yang sesuai untuk pembangunan; dan sistem nilai-nilai dalam masyarakat di negara-negara berkembang tidak sesuai dengan pembangunan (Budiman *dalam* Frank, 1984). Berdasar hasil kajian tersebut, maka kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang harus meninggalkan nilai-nilai tradisional masyarakat dan beralih menggunakan pendekatan modernisasi yang banyak menerima warisan pemikiran dari teori-teori beraliran fungsional dan evolusional. Dalam konteks ini, Huntington (1976) secara tegas mengungkapkan bahwa teori modernisasi memandang “modern” dan “tradisional” adalah dua konsep yang dasarnya bertentangan. Oleh karena itu, teori modernisasi menguraikan karakteristik masyarakat modern dengan melupakan ciri masyarakat tradisional. Dalam proses modernisasi, segala sesuatu yang dikatakan tradisional tidak memiliki peran yang berarti bahkan dalam banyak hal tidak berguna sama sekali dan karena itu harus diganti.

Memang, beberapa hasil kajian yang menggunakan pendekatan modernisasi mampu memberikan gambaran empirik tentang proses modernisasi, seperti hasil kajian Mc Clelland (*dalam* Etzioni dan Eva Etzioni, 1964). Menurut Mc Clelland, orang-orang di negara berkembang tidak memiliki nAch (*need for achievement* atau

dorongan untuk berprestasi) karena kebanyakan orang di negara berkembang bersifat fatalistik dan cenderung menyelesaikan persoalan dengan menyerahkan kepada nasib. Oleh karenanya, diperlukan penularan virus nAch kepada masyarakat di negara-negara berkembang. Kajian sosiologi makro Bellah (1957), tentang agama Tokugawa dan pembangunan di Jepang menemukan bahwa agama Tokugawa memberikan akibat positif terhadap modernisasi Jepang.

Hasil-hasil kajian di atas menjadi semacam panduan dari karya-karya teori modernisasi dan berpengaruh terhadap rangkaian agenda kebijakan pembangunan. Para peneliti tersebut beraliran modernisasi memiliki kerangka analisis yang tidak jauh berbeda satu sama lain karena mereka beranggapan bahwa negara berkembang merupakan negara terbelakang bersama masyarakat tradisionalnya, sebaliknya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat dilihat sebagai negara modern. Dengan kata lain, Berger (1982) menyatakan para teoretikus modernisasi sepakat bahwa kedudukan negara-negara kaya di Barat dilukiskan paling baik dengan ciri mereka sebagai masyarakat industri maju. Atas dasar itu, negara-negara miskin harus mencontoh langkah-langkah yang pernah dilalui oleh masyarakat-masyarakat Barat dalam pendakiannya dari keadaan miskin menjadi kaya. Kerjakanlah seperti yang kami lakukan, maka masalah-masalah anda akan terpecahkan, demikian pesan ahli-ahli modernisasi. Jalan berfikir inilah yang banyak mendasari kebijakan publik di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia yang dimulai sejak pertengahan tahun 1960.

Memasuki tahun 1970, teori-teori modernisasi mulai banyak mendapat kritikan, baik yang bersumber dari kalangan mereka sendiri maupun dari aliran pemikiran Marxis yang secara politik dan akademik memiliki tradisi berbeda. Para pengkritik mengemukakan argumen bahwa teori modernisasi mengesampingkan hal yang berkaitan dengan kompleksitas proses perubahan. Dalam beberapa hasil kajian telah tergambar secara jelas bahwa pranata-pranata sosial tradisional tidak menjadi penghambat proses perubahan. Lebih jauh, para pengkritik

menegaskan bahwa hambatan-hambatan terhadap perubahan dan modernisasi tidak hanya dapat diterangkan berdasarkan orientasi nilai dan norma-norma tradisional saja, tetapi juga mengikutsertakan masalah-masalah konkrit yang timbul karena kebijakan pemerintah dan pola stratifikasi sosial serta perbedaan kondisi lokal. Selain itu, menurut Frank (1969), dalam teori modernisasi tidak dikemukakan hubungan antara kemampuan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat dengan keterbelakangan negara-negara berkembang. Pada umumnya, teori-teori modernisasi terlalu mudah bertolak dari anggapan bahwa proses perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa Barat akan berulang kembali di negara-negara berkembang.

Pengkritik juga mempersoalkan apakah sesungguhnya nilai-nilai tradisional selalu menghambat modernisasi? Apakah selalu diusahakan untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional jika ingin melaksanakan pembangunan yang berlandaskan modernisasi? Menurut pengkritik, kadang kala nilai-nilai tradisional sangat membantu upaya modernisasi. Sebagai contoh, kajian Dove *et al* (1985) tentang peranan budaya lokal dalam proses pembangunan dalam rangka mewujudkan modernisasi di Indonesia. Hasil kajian antropologis yang melihat interaksi antara kebijakan pembangunan nasional dengan aneka ragam budaya lokal yang terdapat di Indonesia tersebut memberikan pesan utama bahwa tradisional tidak harus bermakna terbelakang. Budaya tradisional sangat dan selalu berkaitan dengan perubahan ekonomi, sosial, dan politik dari masyarakat dimana budaya tradisional itu melekat. Jika demikian, budaya tradisional selalu mengalami perubahan yang dinamis, dan karena itu budaya tradisional tidak mengganggu proses pembangunan.

Berkaitan dengan sistem ekonomi tradisional dan pelestarian hutan, hasil penelitian Dove *et al* (1985) maupun hasil kajian Azkar *et al* (2013), tentang pertanian ladang berpindah, usaha mengumpulkan rotan, mengumpulkan sagu, dan mengumpulkan madu merupakan usaha tradisional yang memberikan manfaat fungsional terhadap masyarakat pendukungnya. Bagi penduduk Bima di Pulau Sumbawa dan

Suku Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, pertanian perladangan merupakan alternatif pilihan yang tepat untuk bertani pada tanah pergunungan yang relatif curam dan berbatu. Dengan cara ini, usaha bertani yang dilakukan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup karena setiap lahan bekas berladang kembali ditanami pohon-pohon yang berfungsi lindung sekaligus produktif, khususnya karet.

Uraian di atas membuktikan bahwa pendekatan modernisasi yang banyak dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik di negara-negara berkembang telah kehilangan kemampuannya untuk memecahkan masalah kemiskinan dan marjinalisasi. Pada sisi lain, beberapa teori dan hasil kajian empirik membuktikan banyak sifat dan tradisi masyarakat dianggap menghambat pembangunan oleh pendekatan modernisasi, justru menyokong pembangunan.

### C. Metode Penelitian

Berangkat dari pendapat Sugiyono (2006), Suku Dayak Meratus Juhu yang sebagian besar hidup masih berkelana didekati secara fenomenologis agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan utuh berkenaan dengan tempat, pelaku, dan kegiatan mereka. Peneliti menempatkan diri sebagai instrumen kajian guna mengumpulkan data berdasarkan apa yang diucapkan, dialami, dan dirasakan Suku Dayak Meratus yang termarginalkan. Dengan pola berpikir yang sebangun dengan *perspektif emique* dalam pendekatan kualitatif (Maleong, 2007), digali semua data tentang tempat, pelaku, dan kegiatan Suku Dayak Meratus yang saling terkait dan berinteraksi.

Operasionalisasi falsafah fenomenologis dalam pengumpulan data primer dilakukan melalui metode *participatory rural appraisal* (Chambers, 1992) dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses belajar bersama, melalui teknik: (1) Observasi partisipasi bersama warga guna mengetahui gambaran umum desa, lokasi setiap kelompok pemukiman, kondisi jalan masuk ke desa, kondisi jalan antar lokasi kelompok pemukiman, ketersediaan fasilitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, potensi air bersih, dan potensi lahan; (2) Wawancara, untuk menggali sejarah desa, masalah yang dirasakan Suku

Dayak Meratus berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan aspirasi mereka untuk keluar dari kondisi marjinal.

Wawancara dilakukan dengan Pinan (Kepala Desa), Rani (Penghulu Adat), Abdul Dunduk (tokoh pemuda), Ida (ibu rumah tangga), Kusudiarto (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten HST), Surya Nurzain (Camat Batang Alai Timur), Rusdiansyah (Kepala Bidang Tata Guna Lahan Dishubun Kabupaten HST), dan Yeni S (bidan Puskesmas Tandilang). Sesuai sifat penelitian kualitatif, data yang terkumpul dari berbagai sumber dan teknik tersebut diolah dan dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan Miles dan Hubermans (dalam Sugiyono, 2006). Guna menjaga keabsahan data dilakukan triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.

#### D. Hasil Penelitian: Strategi Pemberdayaan Suku Dayak Meratus

##### 1. Gambaran Umum Desa Juhu

Desa Juhu baru berdiri secara definitif pada tahun 1984 setelah sebelumnya hanya menjadi anak Desa Hinas Kiri. Desa Juhu adalah salah satu desa di pegunungan Meratus dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang seluruh penduduknya Suku Dayak Meratus. Usman (2013) menulis, Dayak Meratus atau Dayak Bukit merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan yang dahulu berdiam di dataran rendah sekitar teluk raksasa dengan pantai timurnya di kaki pegunungan Meratus, tetapi karena berbagai alasan mereka terdesak ke pegunungan Meratus. Suku Dayak Meratus diidentifikasi sebagai sisa imigran Melayu Tua yang paling awal bermigrasi ke Pulau Kalimantan, jauh sebelum masuknya imigran gelombang kedua yang dikenal sebagai Melayu Muda.

Walaupun Suku Dayak Meratus tercatat sebagai penduduk awal Pulau Kalimantan yang terdesak ke Pegunungan Meratus seiring dengan masuknya Melayu Muda, tetapi ketika dilakukan wawancara dengan Pinan (kepala Desa Juhu), beliau hanya mampu mengingat bahwa mereka sudah mendiami kawasan tersebut sejak empat generasi yang lalu, sebagaimana deskripsi di bawah ini.



Gambar 1.  
Silsilah Keturunan Keluarga Pinan

Datu Buta adalah sebutan yang diberikan kepada orang tertua yang sempat dikenal Pinan karena yang bersangkutan masih hidup ketika Pinan masih anak-anak. Datu buta disebut demikian karena mata beliau buta, demikian pula halnya Nini Awat dan Apih artinya nenek laki-laki yang hanya memakai cawat (pakaian dalam pria) dan nenek perempuan yang hanya memakai tapih (sarung yang biasa dipakai wanita) di kalangan Suku Dayak Meratus dan Orang Banjar Hulu. Sebutan tersebut diberikan karena pamali (tabu) bagi Suku Dayak Meratus menyebut nama orang tua. Tradisi ini menyebabkan Pinan tidak mengenal nama Buyut, Anggas, Muyang, dan Muning dari Suku Dayak Meratus yang bermukim di Desa Juhu.

Penduduk Desa Juhu sebanyak 49 kepala keluarga (202 jiwa), dengan perincian RT 1 (Pusat Desa Juhu) berpenduduk 11 KK, RT 2 (Haraan) berpenduduk 13 KK, dan RT 3 (Pitatah) berpenduduk 25 KK. Akan tetapi, hasil pengamatan hanya menemukan 5 buah rumah papan, 6 pondok, 1 balai adat, dan 2 rumah dinas guru SD yang berada dalam 1 lokasi pemukiman di pusat desa, sisanya tinggal di pondok-pondok yang tersebar sesuai lokasi perladangan di Haraan dan Pitatah. Jarak antara pusat desa dengan Haraan sekitar 5 jam perjalanan kaki, sementara ke Pitatah bisa ditempuh sekitar 1 jam. Hanya ada 1 kelompok pemukiman (di pusat desa) yang menetap, selebihnya masih hidup secara berpindah-pindah sesuai dengan perpindahan lokasi perladangan.

Seluruh warga Suku Dayak Meratus Juhu menjadikan berladang pindah sebagai mata-pencapaian utama. Hasil ladang setiap tahun umumnya mampu menjamin kelangsungan pangan bagi seluruh warga dalam periode 1 sampai 2 tahun. Kecukupan ini bisa dipahami karena konsumsi warga sangat sederhana, sebagaimana dikemukakan Pinan sebagai berikut: "Bagi kami yang penting ada beras, garam, dan minyak tanah sudah cukup. Sayuran bisa saja mencari sendiri. Kami terbiasa hidup begini, dan kami merasa nyaman saja. Disini belum ada warung atau kios, sehingga tidak ada tempat belanja."

## 2. Kondisi Alam dan Nilai Tradisional

Pusat Desa Juhu bisa dicapai dari Kiyu (anak Desa Hinas Kiri) melewati jembatan sungai Suato dan terus menyusuri jalan setapak turun-naik Gunung Taniti Ranggung, Datar Alai, dan Gunung Kila'i (ketinggian  $\pm$  1.450 m dpl) selama 2 hari perjalanan kaki. Hasil wawancara dan observasi menemukan bahwa program pembangunan fisik yang terkait prasarana mobilitas masyarakat hampir tidak terlihat, kecuali 2 buah jembatan gantung yang dibangun tahun 2010, yaitu jembatan sungai Angkarayu dan Aing Muhut. Sementara sungai Kagaringan dan Juhu dengan lebar  $\pm$  25 m masih belum ada jembatan, sehingga ketika terjadi hujan dan air meluap, warga tidak bisa menyeberang.

Pusat Desa Juhu berada pada hamparan datar di ketinggian 551 meter (dpl) diantara Gunung Kila'i, Gunung Mangsilau, Gunung Tambayang, Gunung Taniti Bantai, Gunung Taniti Batu, Gunung Halau-halau (gunung tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan), dan beberapa gunung lain yang lebih rendah seperti Gunung Ma'agah, Batung Kamauk, Unjal Meratus, Unjal Tuba, Maingkih, Taniti Padang, dan Linau Tumpak. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah pusat Desa Juhu dikelilingi oleh hutan lindung.

Kebijakan pemerintah menjadikan kawasan sekitar Desa Juhu sebagai hutan lindung mendapatkan dukungan penuh dari kepala desa dan Suku Dayak Meratus setempat, walaupun untuk mempertahankan kelestarian hutan ini Suku Dayak Meratus Juhu sering mendapatkan

iming-iming dan tekanan dari berbagai pihak. Menurut Pinan, dulu salah satu perusahaan kayu ternama pemilik HPH yang berpusat di Banjarmasin mencoba merambah kawasan hutan mereka, tetapi kepala desa melaporkan masalah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang langsung menghentikan aktivitas perusahaan. Tekanan tidak berhenti sampai di situ, selama 2 tahun terakhir sudah 2 kali warga menolak tawaran pihak perusahaan kayu yang hendak melakukan eksploitasi hutan, yakni 1 kali ditawarkan langsung oleh pemilik perusahaan dan 1 kali melalui oknum tokoh masyarakat dari Suku Dayak Meratus yang berasal dari desa lain.

Upaya Suku Dayak Meratus mempertahankan hutan memang sesuai hasil pengamatan lapangan yang tidak menemukan kawasan gundul di sekitar Desa Juhu. Kenyataan ini juga sejalan dengan hasil studi dokumentasi terhadap Radar Banjarmasin (9 April 2011) yang mengutip pernyataan Dwitho Frasetiandy (Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan) sebagai berikut. "Kalau melihat kondisi di lapangan, hutan lindung yang terawat memang hanya tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saja, sehingga di sinilah satu-satunya hutan asli (*native forest*) di Kalimantan Selatan." Pendapat senada dikemukakan Ramliyadhi (Kepala Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai BP-DAS Barito) yang menyatakan: "Hutan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih terjaga kelestarian alamnya dibanding daerah tetangga lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari 2 DAS yang hulunya berada di pegunungan Meratus, yakni DAS Barabai dan DAS Batang Alai yang saat ini kondisinya masih terjaga. Kondisi air terbilang cukup jernih. Begitu pula dengan vegetasi di sekitar jalur kedua DAS ini juga masih baik."

Penelusuran lebih mendalam menemukan kaitan antara kelestarian hutan di sekitar Desa Juhu dengan sistem sosial budaya Suku Dayak Meratus. Dalam suatu diskusi terfokus tentang keberadaan hutan, Suku Dayak Meratus Juhu bersepakat bertahan memelihara kelestarian hutan dengan menyatakan:

"Kami mulai datu-nini bermukim di sini, dan kami tidak akan meninggalkan tanah leluhur ini. Kami diajarkan untuk tidak menebang

dan mengizinkan pihak manapun juga untuk menebangi pohon di gunung-gunung sekitar Desa Juhu. Kalau pohon ditebangi maka hancurlah kita semua, baik kami yang bermukim di gunung secara turun temurun maupun saudara-saudara kami yang bermukim dibawah sana. Kami juga menyayangi binatang dan tumbuhan lain yang hidup dalam hutan pegunungan Meratus, termasuk tidak menangkap ikan di sungai menggunakan racun. Kami cukup makan nasi bersama sayur-sayuran seadanya, dan walaupun ingin makan lebih enak, kami memotong ayam peliharaan. Untuk berladang saja kami tidak pernah membuka hutan di gunung, kami berladang di mungkur-mungkur (gunung kecil: pen) yang selalu kami tanami kembali pohon lain sebelum berpindah ke ladang yang baru, dan biasanya kami kembali ke ladang asal sekitar 10-12 tahun.”

Ketika masalah jalan didiskusikan dengan kepala desa dan warga Suku Dayak Meratus Juhu, mereka sepakat menyatakan:

“Kami pada dasarnya lebih suka jalan seperti apa adanya sekarang, sebab jika pembangunan jalan diintensifkan, misalnya dapat dilalui kendaraan bermotor roda 2, maka dikhawatirkan akan muncul efek yang sangat besar, yakni hancurnya kawasan hutan lindung di Gunung Taniti Ranggung, Gunung Kila’i, dan hutan di gunung lainnya akibat masuknya orang luar yang menebang kayu secara ilegal. Jadi biarlah kami berjalan kaki saja bolak balik kalau ada keperluan di Hinas Kiri atau kalau ada urusan di kantor Kecamatan Batang Alai Timur. Kalau memang harus membuka jalan untuk kelancaran arus barang dan jasa suatu saat nanti, kami menyarankan untuk membuat jalan setapak yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 menuju Desa Aing Bantai–Batu Perahu–Atiran, dan keluar di Desa Hinas Kiri.”

Komitmen Suku Dayak Meratus Juhu untuk memelihara kelestarian hutan tersebut menjadi semacam cetak biru kultural yang harus diikuti dari generasi ke generasi. Perilaku orang luar desa yang sering membuat kerusakan, seperti

menembak burung, menjebak menjangan (rusa), dan menebang pohon secara ilegal sesungguhnya bertentangan dengan tradisi Suku Dayak Meratus Juhu. Khusus perilaku penebangan kayu ilegal, dinilai warga sebagai pangkal *pungkala* kerusakan alam Pegunungan Meratus masa kini, sebagai kelanjutan dari proses penghancuran alam akibat kebijakan pemerintah pusat di masa orde baru yang memberikan HPH kepada investor asing maupun domestik. Dampak lanjutan dari kehancuran hutan Pegunungan Meratus adalah musnahnya kekayaan flora dan fauna serta banjir di musim hujan yang secara faktual menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa di desa-desa hilir sepanjang daerah aliran Sungai Alai. Kekhawatiran akan hancurnya lingkungan alam, khususnya hutan Gunung Taniti Ranggung dan Kila’i yang menjadi kawasan hutan juga yang melatarbelakangi “penolakan” warga Dayak Juhu terhadap tawaran pembuatan jalan, sekalipun untuk kendaraan bermotor roda dua.

Nilai tradisional Suku Dayak Meratus berkenaan dengan pelestarian hutan di atas sejalan dengan pernyataan Ali Fahmi (Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah) dalam Radar Banjarmasin (9 April 2011) sebagai berikut.

“Pegunungan Meratus begitu tersohor karena selama ini berfungsi sebagai hulu sungai sebagian besar sungai di Kalimantan Selatan, sehingga sedikit saja Meratus dijamah tentu dampaknya sangat besar dan bencana siap menanti layaknya bom waktu. Karena itu sangat terasa karena kawasan meratus sebagai penyelamat keseimbangan ekosistem yang harus diwariskan kepada anak cucu. Meratus adalah benteng terakhir wilayah tangkapan air dan wilayah pelestarian plasma nuftah demi menjaga wilayah.”

Uraian di atas menegaskan bahwa nilai tradisional Suku Dayak Meratus menjadi bingkai perilaku mereka dalam memelihara kelestarian alam, khususnya hutan Pegunungan Meratus. Kearifan Suku Dayak Meratus Juhu ini merupakan faktor utama yang menjadikan hutan di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai satu-satunya hutan yang masih terjaga kelestariannya. Sebuah kawasan hutan di jantung Provinsi Kalimantan Selatan (*Heart of South Borneo*) yang menjadi rebutan keserakahan manusia modern.

### 3. Pelayanan Dasar

Kebijakan pemerintah Orde Baru memarjinalkan Suku Dayak Meratus tidak terbatas pada pengekangan hak-hak ekonomi, tetapi juga pengabaian hak-hak sosial. Kalau konstitusi mengamanatkan tujuan dibentuknya negara antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, maka amanat tersebut bagaikan mimpi bagi Suku Dayak Meratus Juhu karena pemerintah sebagai agen pembangunan (*agent of development*) tidak pernah menyentuh pelayanan dasar, termasuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

**Pelayanan Pendidikan:** Selama masa pemerintahan orde baru, Suku Dayak Meratus di Desa Juhu tidak pernah melihat fasilitas di desa mereka. Akibatnya, nyaris tidak ada warga yang berusia tua (umur 50-an tahun) yang berpendidikan dasar, sebagaimana penuturan Pinan sebagai berikut. "Pada tataran generasi saya hanya ada 1 orang yang tamat Sekolah Dasar, yaitu saya sendiri. Dulu saya sekolah ke Desa Hinas Kiri dengan cara menginap di rumah mamarina (saudara ayah atau ibu:pen). Ada 2 orang yang sama-sama sekolah dengan saya waktu itu, tetapi keduanya putus ditengah jalan. Memang sekolah waktu itu terasa sangat berat karena kami harus meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan orang tua, dan hidup seadanya di rumah keluarga di Hinas Kiri. Kalau bekal beras habis kami pulang mengambil atau orang tua yang mengantar bersamaan dengan mereka turun ke Desa Hinas Kiri untuk berbelanja berbagai kebutuhan pokok, seperti membeli garam dan pakaian.

Akan tetapi, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa program pembangunan di sektor pendidikan sudah menyentuh Desa Juhu berupa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kecil yang

menurut hasil diskusi dengan warga dibangun melalui tahapan sebagai berikut. Pada tahun 1999 dibangun 3 kelas; Tahun 2003 dibangun lagi 2 kelas; dan Tahun 2005 dibangun 1 kelas bersama 2 buah rumah guru. Pembangunan SDN Kecil ini merupakan pembangunan fisik pertama yang dilakukan pemerintah di Desa Juhu dan pelaksanaannya dimulai bersamaan dengan awal pemerintahan reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 1999, sehingga diberi nama SDN Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dilihat dari perspektif politik pembangunan, memang sulit untuk menyatakan bahwa berdirinya SDN ini merupakan implementasi kebijakan perubahan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan "anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah" karena pada tahun 1999 baru awal pemerintahan reformasi, apalagi kewenangan pendidikan dasar sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah sejak masa orde baru. Sikap yang logis adalah memandang kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan dasar sampai ke pelosok Desa Juhu nan jauh di hutan pegunungan Meratus sebagai wujud konkrit spirit reformasi pemerintahan di era otonomi daerah.

Kehadiran SDN Gus Dur ini disambut antusias oleh anak-anak bersama orang tuanya, sehingga kini terdaftar 70 orang murid. Rasa antusias muncul karena para orang tua ingin melihat anak-anak tidak lagi seperti mereka yang umumnya buta huruf, walaupun untuk menyelesaikan sekolah anak-anak harus berjalan kaki selama dua hari guna mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) di Sekolah Dasar Induk Desa Hinas Kiri dan tentu saja harus menginap selama masa ujian, karena status SDN Juhu masih filial dari SDN Hinas Kiri.

Persoalan lain adalah berkenaan lokasi pemukiman warga yang berpencaran dan jauh dari pusat desa, seperti di Haraan (RT 2) dan Pitatah (RT 3) yang berdampak kepada sulitnya anak-anak menjangkau sekolah setiap hari karena jaraknya jauh. Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat disadari oleh orang tua Suku Dayak Meratus, sehingga dalam sebuah

diskusi mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah berkenan memfasilitasi pembangunan pemukiman yang lebih dekat ke pusat desa supaya anak-anak lebih mudah setiap hari mengikuti pendidikan dasar di SDN Gus Dur.

Keterbatasan guru juga merupakan masalah yang sangat krusial bagi sekolah yang berada di pedalaman Pegunungan Meratus. Hasil diskusi terfokus mendapatkan data bahwa guru yang ada hanya 8 orang, yakni 3 orang berstatus pegawai negeri dan sisanya merupakan guru tidak tetap (honorar). Semua guru yang berstatus pegawai negeri berasal dari luar desa, 2 orang tidak aktif lagi mengajar selama  $\pm$  3 tahun terakhir, sementara 1 orang merupakan guru yang diangkat awal tahun 2014 tetapi hanya mengajar selama 1 hari dan (Agustus 2014) tidak pernah kembali ke Desa Juhu. Konsekuensinya, kegiatan belajar mengajar di SDN Juhu hanya dilayani oleh tenaga tidak tetap (guru honorar).

**Pelayanan Kesehatan:** Pengamatan lapangan sama sekali tidak menemukan adanya fasilitas kesehatan di Desa Juhu. Dalam kaitan ini, Yeni S seorang bidan yang bertugas di Puskesmas Tandilang sejak awal tahun 2004 menyatakan:

“Dulu tidak ada sama sekali pelayanan kesehatan di Desa Juhu, kalau ada juga petugas kesehatan naik kesana hanya setahun sekali. Tetapi sejak tahun 2013, kami melakukan pelayanan 6 bulan sekali sesuai kemampuan biaya operasional yang cukup besar, selain perlu waktu dan tenaga ekstra. Untuk pelayanan ke Desa Juhu kami perlu waktu 2 hari berjalan kaki baru sampai, kemudian pelayanan selama 2 hari, dan pulang juga perlu waktu 2 hari, sehingga total waktu 1 kali kegiatan pelayanan 6 hari. Padahal masyarakat Desa Juhu sudah terbuka menerima pelayanan kesehatan secara medis, seperti imunisasi, keluarga berencana, ibu hamil dan melahirkan. Walaupun harus saya akui, banyak ibu hanya memeriksakan kehamilan tetapi tidak melanjutkan sampai melahirkan. Sampai saat ini saya tidak tahu alasannya mengapa ibu-ibu disini masih enggan melahirkan ditolong bidan.”

Keterbatasan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Juhu diakui Surya Nurzain (Camat Batang Alai Timur) dengan menyatakan, “Kami harus mengakui, memang kehadiran petugas kesehatan 1 atau maksimal 2 kali dalam setahun dirasakan sangat kurang oleh Suku Dayak Meratus yang bermukim di Desa Juhu, tetapi itulah batas kemampuan sumberdaya Puskesmas Tandilang yang juga harus melayani penduduk 5 desa lainnya dengan kelompok-kelompok pemukimannya menyebar di pegunungan Meratus.” Minimnya pelayanan kesehatan dan seringnya warga menderita penyakit diare yang biasanya terjadi menjelang musim hujan, sangat disadari oleh Pinan selaku kepala desa, beliau menyatakan:

“Kami disini memang tetap percaya ada kekuatan halus yang bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit, tetapi kami juga percaya ada beberapa penyakit yang harus diobati secara medis. Mengingat jalan menuju desa ini sangat sulit bagi petugas kesehatan dari Puskesmas Tandilang, maka saya menyekolahkan Abdul Dunduk dibidang kesehatan. Selain itu, dulu saya mendapatkan anjuran seorang dokter PTT yang pernah berkunjung ke Juhu yang menyarankan agar kalau ada anak-anak yang tamat SD supaya dilanjutkan sekolahnya sampai ke sekolah bidang kesehatan karena masyarakat desa ini sangat memerlukan pelayanan kesehatan.”

Kini, setelah Abdul Dunduk berhasil menyelesaikan pendidikan Akademi Keperawatan dan menjadi tenaga honorar di Puskesmas Tandilang, pelayanan kesehatan dapat dirasakan warga lebih mudah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dunduk sebagai berikut.

“Selaku anak desa yang disekolahkan kepala desa sampai selesai kuliah di Akper Barabai, saya selalu pulang ke desa setiap bulan sekali atau bahkan setiap menerima informasi ada warga yang sakit. Saya berikan pengobatan di Balai Adat atau di rumah dan pondok-pondok warga yang sakit. Persoalan yang sering saya hadapi adalah kalau warga yang sakit bermukim di Haraan atau pondok-pondok di ladang, jalan menuju

pondok mereka sangat jauh, sehingga pelayanan saya juga sangat terbatas. Jenis penyakit yang paling banyak diderita warga adalah diare, bahkan sekitar tahun 2003 atau 2004 yang lalu penyakit diare merenggut nyawa 5 orang dalam sebulan.”

Walaupun keberadaan Dunduk sebagai anak desa yang memiliki keahlian pelayanan kesehatan dirasakan warga Dayak Meratus sangat membantu, tetapi hasil diskusi dengan beberapa ibu rumah tangga mendapatkan data bahwa mereka masih sangat memerlukan kehadiran petugas kesehatan yang lebih intensif. Menurut Ida (ibu 1 orang anak), “Jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan ibu-ibu adalah untuk keluarga berencana, seperti pemasangan implant/susuk dan suntik. Selain itu kami juga memerlukan pelayanan ibu hamil, dan membantu persalinan yang selama ini ditangani oleh dukun kampung yang semuanya laki-laki.”

Sikap terbuka dan tekad kepala desa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cara mendidik warga sendiri serta aspirasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik mendapatkan respons dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membuat program pembangunan Pusat Kesehatan Desa Pembantu. Hal ini disampaikan oleh Kusudiarto (Kepala Dinas Kesehatan HST) sebagai berikut.

“Kami menyadari bahwa pelayanan kesehatan ke Desa Juhu sangat jauh sehingga memerlukan banyak waktu dan tenaga serta belum ada tempatnya. Tetapi demikian, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, pada tahun anggaran 2014 kami upayakan untuk membangun Pusat Kesehatan Desa (Puskesmas) di Juhu dengan harapan bisa memudahkan para petugas kesehatan melaksanakan tugasnya di sana, termasuk menempatkan warga desa yang telah berpendidikan keperawatan.”

Rencana pembangunan Puskesmas membuktikan bahwa persoalan kesehatan yang dihadapi Suku Dayak Meratus yang jauh di Desa Juhu mendapatkan respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salah satu

faktor pemicu utama respons pemerintah adalah karena kewenangan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Di sisi lain, berkembangnya aspirasi Suku Dayak Meratus Juhu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih intensif, termasuk untuk pelayanan keluarga berencana, ibu hamil, dan persalinan merupakan fakta lain bahwa Suku Dayak Meratus terbuka terhadap program pembangunan, di tengah-tengah kentalnya nilai tradisional.

#### **4. Potensi Keswadayaan**

Kondisi geografis dan lokasi pemukiman yang terpencil menjadi faktor utama kesulitan dan keengganan aparat pemerintah memberikan pelayanan kepada Suku Dayak Meratus di Desa Juhu. Kondisi marjinal dan suasana trauma atas perlakuan pemerintahan Orde Baru serta perasaan khawatir menyaksikan perilaku rezim reformasi yang belum seluruhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat adat, khususnya dalam hal pelestarian hutan, Suku Dayak Meratus Juhu berjuang membangun diri sendiri. Pada bidang ekonomi, Suku Dayak Juhu sudah mengembangkan ternak kerbau dan ayam sejak beberapa tahun lalu. Kerbau pada mulanya hanya 2 ekor (satu pasangan jantan-betina) dan sudah berkembang menjadi 30 ekor, tetapi sebagian sudah dijual kepada orang luar di Hinas Kiri. Berbeda dari kerbau, ternak ayam umumnya hanya untuk konsumsi sendiri, khususnya untuk upacara ritual seperti aruh pasca panen atau kalau ada tamu dari luar yang menginap. Jenis tanaman yang sudah dikembangkan warga dan menjadi komoditas komersial (bisa dijual) adalah lombok/cabe rawit dan kayu manis, sedangkan pisang hanya untuk konsumsi sendiri. Tanaman yang paling baru dikembangkan dan diharapkan menjadi usaha produktif masa depan adalah karet yang diintrodusir kepala desa sejak 3 tahun lalu. Kepala desa memelopori penanaman karet karena karet dianggap mampu memelihara kelestarian alam, yang diolah menjadi marlong juga bisa diangkut menggunakan kendaraan bermotor roda dua kelak apabila dibangun jalan penghubung melalui Desa Aing Bantai dan Batu Perahu.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, Pinan selaku tokoh Dayak Meratus yang juga seorang kepala desa mengambil inisiatif sebagai berikut.

“Berawal dari adanya sekolah dasar di sini, kini sudah ada 6 orang yang melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tetapi hanya 3 orang yang bisa melanjutkan kuliah, yakni di STIKIP Barabai 1 orang jurusan bahasa Indonesia dan 1 orang jurusan bahasa Inggris. Kedua anak ini sudah selesai kuliah dan sekarang menjadi guru honorer di SDN Juhu, mudah-mudahan bisa menjadi pegawai negeri. Selain itu, kami mendidik 1 orang di Akademi Keperawatan Barabai dan mulai awal tahun 2013 lalu bekerja sebagai tenaga honorer pada Puskesmas Tandilang. Sebenarnya kami ingin juga melanjutkan pendidikan 3 orang yang tamat SLTA ini, tetapi kendala untuk melanjutkan ke perguruan tinggi adalah keterbatasan biaya, sementara bantuan dari pihak lain belum ada sama sekali. Karenanya, saat ini yang bersangkutan kami jadikan guru bantu/honorer di SDN Juhu.”

Anak-anak ini (Abdul Dunduk paramedis; Robby Frasetio sarjana Bahasa Inggris dan Dumi sarjana Bahasa Indonesia lulusan STIKIP Barabai) merupakan pioner pembangunan desa yang siap berjalan kaki keluar-masuk desa melintasi Gunung Taniti Ranggung dan Gunung Kila'i. Penerimaan atau kesadaran Suku Dayak Meratus Juhu terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan disatu sisi dan penolakan terhadap pembangunan jalan dari Kiyu menuju pusat Desa Juhu disisi lain, bisa dipahami sebagai sebuah “penerimaan terbatas” atau “penerimaan yang disertai resistensi” terhadap program pembangunan. Manakala didalami makna yang tersirat dibalik penolakan pembangunan jalan ditemukan jawaban yang sesungguhnya, yakni trauma atas kebijakan pemerintahan Orde Baru yang secara beringas membatasi hutan, dan pola seperti ini berlanjut di era reformasi dengan pelaku para warga lokal yang mendapatkan beking oknum aparat keamanan di era reformasi.

Jika fakta di atas dianalisis dengan pendekatan kebijakan publik dapat ditarik benang merah bahwa terdapat perbedaan kebijakan antara pemerintahan orde baru yang sentralistik dengan pemerintahan reformasi yang mendesentralisasi beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk kewenangan sektor pendidikan dasar dan kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa hakekat otonomi daerah yang ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibuktikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan secara nyata dan rencana pembangunan fasilitas kesehatan bagi Suku Dayak Meratus di Desa Juhu.

## E. Penutup

**Kesimpulan:** Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Suku Dayak Meratus Desa Juhu telah lama mengalami proses marginalisasi sehingga sampai saat ini tetap waspada terhadap kehadiran orang luar, terutama mereka yang perilakunya cenderung merusak lingkungan alam hutan; Dalam kondisi marginal, Suku Dayak Meratus Juhu memiliki strategi bertahan hidup dan mengembangkan diri dibidang ekonomi dan sosial, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan.

**Saran:** Guna mempercepat pengembangan Suku Dayak Meratus Juhu, disarankan kepada pemerintah daerah (Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan) agar memfasilitasi pengembangan tanaman perkebunan karet dan pengembangan peternakan kerbau; merealisasikan rencana pembangunan Pusat Kesehatan Desa Juhu beserta peralatan dan obat-obatan yang memadai serta menempatkan paramedis dari penduduk setempat; menambah dan menempatkan guru SDN Juhu dari penduduk setempat yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana; dan melakukan kajian terhadap aspirasi Suku Dayak Meratus Juhu yang ingin dibuatkan jalan setapak penghubung dengan Desa Aing Bantai dan Batu Perahu.

### Pustaka Acuan

- Anonim, (1996). *Berbuat Bersama Berperan Setara*. Awal Penerapan Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara. Bandung: Studio Driya Media.
- Azkar, N. et al. (2013). *Laporan Hasil Penjajakan Awal di Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- Baswir, R. et al. (1999). *Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru*. Pustaka Pelajar Jakarta: IDE Elsam.
- Bellah, R. N. (1957). *Tokugawa Religion*, Boston: Beacon Press.
- Berger, P. L. (1982). *Piramida Kurban Manusia. Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Terjemahan A. Rahman Tolleng, Jakarta: LP3ES.
- Budiman, A. (1984). Sebuah Pengantar dalam Andre Gunder Frank, *Sosiologi Pembangunan dan Ketertinggalan Sosiologi*. Pustaka Pulsar.
- Chamber, R. (1992). *Memahami Desa secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Clelland, D. Mc, (1964). "Businnes Drive and National Achievement" dalam Amitai Etzioni dan Eva Etzioni (ed.), *Social Change*, New York: Basic Books.
- Dove, M. et al. (1985). *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Huntington, S. (1976). "The Change to Change: Modernization, Development, and Politics" dalam Cyril E.Black (ed.), *Comparative Modernization: A Reader*.New York: The Free Press.
- Kunarjo, (1996). "Sejarah Perencanaan Pembangunan. Sebuah Tinjauan Singkat" dalam Jurnal Prisma. PT Pustaka LP3ES Jakarta: Indonesia.
- Maleong, L. J.(2007).*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Mubyarto,et al. (1991). *Kajian Sosial Ekonomi Desa-desa Perbatasan di Kalimantan Timur*. Yogyakarta: Aditya Media,.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatno, Budi, 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Jakarta: Media Berlian.
- Tsing, A. L. (1998). *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan. Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ananta, A. (2010). *Borneo Economic Integration: Concepts and Paradigms*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Usman, S. (2013). *Orang Ngabang Orang Banjar Orang Melayu*. Makalah Seminar Kebudayaan Kesultanan se Borneo di Martapura.